

BAB  I	<b>PENDAHULUAN</b>
--------------	--------------------

## **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi
4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Bidang Cipta Karya
6. Bidang Tata Ruang
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan skala kota;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

- 2. Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- b. Pengelolaan program administrasi
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum, penatausahaan barang milik daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

## **3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi,**

Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan keciptakarya;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :

### **1) Seksi Perencanaan Keciaptakarya**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang keciptakarya.

Fungsi Seksi Perencanaan Keciaptakarya adalah :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang keciptakarya dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang keciptakarya;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang keciptakarya; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan-bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

Fungsi Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **3) Seksi Bina Jasa Konstruksi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Fungsi Seksi Bina Jasa konstruksi, adalah :

- a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
- c. penyusunan profil jasa konstruksi;
- d. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

#### **4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

##### **1) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala kota.

Fungsi Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

##### **2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin,

berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala kota.

Fungsi Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air**

Mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Fungsi Seksi Terminal dan Perparkiran, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Cipta Karya**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;

- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya terdiri dari :

### **1) Seksi Pembangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan

Seksi Pembangunan Mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pembangunan keciptakarya skala kota;
- b. pelaksanaan program pembangunan keciptakarya;
- c. pembinaan perizinan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah kota.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- c. penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, Kampung Improvement Program (KIP) dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- b. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

## **6. Bidang Tata Ruang**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BidangTata Ruang terdiri dari :



### **1) Seksi Pertanahan dan Tata Ruang**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. pemrosesan penerbitan Advice Planning dan rekomendasi perizinan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **2) Seksi Tata Bangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program tata bangunan skala kota;
- b. pelaksanaan program tata bangunan skala kota;
- c. pemeriksaan persyaratan teknis IMB;
- d. pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Seksi Pengawasan Bangunan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**7. UPTD**

**8. Kelompok Jabatan Fungsional**

**C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

AspekStrategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
5. Tingginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.
6. Sistem informasi yang terus berkembang.

#### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan OPD Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
3. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal.
4. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan.
5. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang
6. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan.
7. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

Setelah dilakukanpenilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga

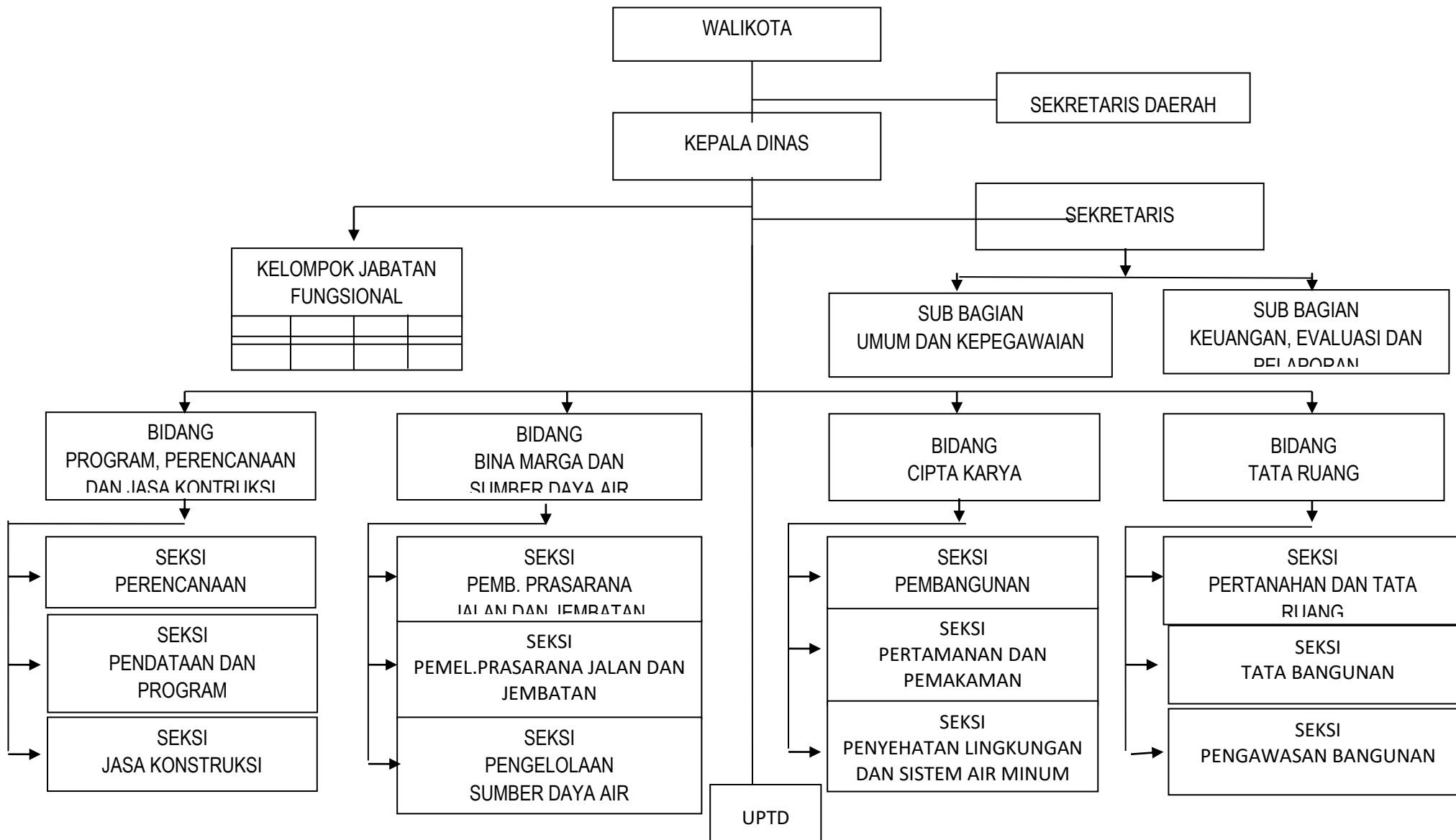
diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dalam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS/CPNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2020**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS	34	14	48	43,47
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	38	27	65	56,52
	Jumlah	72	41	113	100

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	1	-	1	2
3	SLTA	10	-	10	20
4	Muda/D3 Sarjana	5	3	8	10
5	Sarjana (S1)	15	9	24	50
6	Pasca Sarjana/ Master (S2)	2	2	4	6
	Jumlah	34	14	48	100 %

Secara riil jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 50 orang ASN.

**Tabel. 1.3**  
**Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan Tahun 2020**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	Golongan I	1	-	1	2
	Golongan II	14	1	15	30
	Golongan III	20	9	29	58
	Golongan IV	3	2	5	10
	Jumlah	38	12	50	100

Pada Tabel. 1.3 dapat dilihat bahwa Pegawai dengan golongan IV berjumlah 5 (Lima) orang. Pegawai dengan golongan III berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Sedangkan pegawai dengan golongan II berjumlah 15 (Lima Belas) orang, dan Golongan I berjumlah 1 (Satu) Orang.

**A. MISI**

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni :

**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“**

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senada dengan Misi 1 Kota Padang Panjang adalah Ekonomi :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis  
Pembangunan Berkelanjutan”**

**B. TUJUAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan”**

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

**C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

- 1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar**
- 2. Meningkatnya Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang**



**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran/IKU</b>
Untuk Kejayaan Kota Padang panjang yang berrmarwah dan Bermartabat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar	a. Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik  b. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak  c. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
			Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

#### D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2020	
1	2	4	6
1	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	67,14 %	Rata-rata Pembangunan Jalan,Irigasi,drainase,Trotoar,Bangunan Gedung RTH, sarana sanitasi,PJU yang dibangun atau direhab/ Rata-rata Jalan,Irigasi,drainase,Trotoar,Bangunan Gedung,RTH,sarana Sanitasi,PJU yang direncanakanx100%
2	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak  Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	79,30%	Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak / Total jumlah rumah di kota padang panjang x100%
3	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	100%	Total jumlah rumah yang mempunyai air minum / jumlah rumah di kota padang panjang x 100%
4	Meningkat nya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	2,8	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2020	
1	2	4	6
1	Persentase ketersediaan Sarana Publik	40%	Jumlah sarana publik yang dibangun/jumlah kebutuhan sarana publik x 100%
2	Persentase Trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	33%	Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/panjang keseluruhan trotoar x 100%
3	Persentase Jalan dalam kondisi baik	91,50%	Panjang jalan dalam kondisi baik/total keseluruhan panjang jalan x 100 %
4	Persentase Penerangan jalan umum	75%	Jumlah pemasangan PJU/Total Kebutuhan Pemasangan PJU x 100%
5	Persentase RTH Publik	2,7%	Luasan RTH publik yang tersedia/Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia x 100%
6	Rasio Bangunan BerIMB	0,767	Jumlah bangunan ber IMB/Jumlah Bangunan

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar	a.Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	67,14%
		b.Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	79,30%
		c. Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	100%
2.	Meningkatnya kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	2,8

**a. Umum dan Penataan Ruang**

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
V	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik</b>	<b>620.121.700</b>	<b>562.451.550</b>	<b>90,70 %</b>
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	70.535.400	42.410.400	60,13 %
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum	310.450.000	297.669.250	95,88%
3	Rehab Sarana Prasarana Umum	38.800.000	22.035.600	56,79%
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	200.336.300	200.336.300	100,00%
VI	<b>Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi</b>	<b>133.462.500</b>	<b>121.610.100</b>	<b>91,12%</b>
1	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	3.200.000	3.190.350	99,70%

	2	Penyusunan Database Drainase dan Trotoar	105.725.000	104.003.250,00	98,37 %
	3	Penyusunan Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum	24.537.500	14.416.500,00	58,75 %
<b>VII</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan</b>		<b>7.251.855.000</b>	<b>5.942.082.681,63</b>	<b>81,94 %</b>
	1	Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar	396.050.000	389.345.000,00	98,31 %
	2	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	718.300.000	681.454.203,75	94,87 %
	3	Penunjang DAK Infrastruktur Jalan	179.540.000	82.567.500,00	45,99%
	4	DAK Bidang Jalan	5.957.965.000	4.788.715.877,88	80,38 %
<b>VIII</b>	<b>Pembangunan Dan Pemeliharaan Trotoar</b>		<b>79.970.775</b>	<b>48.915.900,00</b>	<b>61,17 %</b>
	1	Pembangunan Trotoar	32.500.000	22.114.700	68,05 %
	2	Rehabilitasi Trotoar	47.470.775	26.801.200	56,46 %
<b>IX</b>	<b>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>		<b>370.000.000</b>	<b>346.895.305,00</b>	<b>93,76 %</b>
	1	Rehabilitasi Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong	370.000.000	346.895.305	93,76 %
<b>X</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Penggairan Lainnya</b>		<b>2.062.675.000</b>	<b>1.577.523.971,79</b>	<b>76,48 %</b>
	1	Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	513.400.000	492.061.889,78	95,84 %
	2	Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi	152.600.000	78.462.082	51,42 %
	3	DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	1.396.675.000	1.007.000.000,01	72,10 %
<b>XI</b>	<b>Pengembangan , Pengelolaan Dan Konservasi Sungai</b>		<b>45.500.000</b>	<b>36.485.920,00</b>	<b>80,19 %</b>
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	22.650.000	18.130.320,00	80,05 %
	2	Pembangunan Pengaman Sungai	22.850.000	18.355.600,00	80,33 %
<b>XII</b>	<b>Program Penerangan Jalan Umum</b>		<b>916.299.400</b>	<b>756.166.026,00</b>	<b>82,52 %</b>
	1	Penambahan jaringan Tiang lampu Jalan Dalam Kota	-	-	-
	2	Pemeliharaan Jaringan, Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota	916.299.400	756.166.026,00	82,52%
<b>XIII</b>	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>		<b>2.322.390.100</b>	<b>2.145.210.468</b>	<b>92,37 %</b>
	1	Penataan RTH	403.690.100	384.308.530,00	95,20 %
	2	Pemeliharaan RTH	1.918.700.000	1.760.901.938,00	91,78 %
<b>XIV</b>	<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>28.487.800</b>	<b>25.759.750,00</b>	<b>90,42 %</b>
	1	Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)	4.875.000	2.146.950,00	44,04%
	2	DAK Sanitasi Air Limbah	-	-	-
	3	Bangunan Pembuangan Air Kotor	23.612.800	23.612.800	100,00%
	4	Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum	-	-	-

<b>XVI I</b>	<b>Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>643.262.100</b>	<b>612.663.601</b>	<b>95,24 %</b>
	<b>1</b>	<b>Pembinaan Fasilitas Tim Ahli Bangunan Gedung</b>	<b>15.050.000</b>	<b>13.582.000</b>	<b>90,25%</b>
	<b>2</b>	<b>Survey dan Pemetaan</b>	<b>8.350.300</b>	<b>6.705.138</b>	<b>80,30 %</b>
	<b>3</b>	<b>Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Fasilitas Umum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>4</b>	<b>Pematokan Tanah Yang Telah Diserahkan Masyarakat Untuk Fasilitas Umum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5</b>	<b>Pengawasan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>14.250.000</b>	<b>3.588.750,00</b>	<b>25,18 %</b>
	<b>6</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>10.950.000</b>	<b>4.993.700</b>	<b>45,60 %</b>
	<b>7</b>	<b>Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>8</b>	<b>Revisi RTRW</b>	<b>594.661.800</b>	<b>583.794.013,00</b>	<b>98,17 %</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>14.474.024.375</b>	<b>12.175.765.273,40</b>	<b>84,12%</b>

## G. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 adalah mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan .

Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

**Tabel 2.5**  
**Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan**

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan dan jembatan	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan 2.Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik
		2.Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung	1.Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.mengembangkan trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas 3.meningkatnya RTH yang berbasis digital
		3.Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan	1.pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan

		4.melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik	1.meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik
		5.meningkatnya kinerja layanan irigasi	1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi 2.meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi an bangunan perairan lainnya
		6.Meningkatkan kapasitas pengelola SDA	1.peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
		7.Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata	1.meningkatnya penataan sungai 2.meningkatnya kualitas pengeolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
		8.meningkatnya cakupan layanan air minum aman dan sistem perpipaan	11.penambahan jaringan air minum 12.mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum
		9.meningkatnya pelayanan jaringan drainase kawasan perkotaan	1.peningkatan penyediaan jaringan drainase kota 2.meningkatnya persentase jalan kota yang memiliki



			drainase
		10.meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan	1.Penataan bangunan dan lingkungan 2.meningkatnya ketersediaan fasilitas umum perkotaan
		11.meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi
		12.meningkatnya kualitas layanan perizinan jasa konstruksi	1.tersedianya layanan IUJK yang sesuai SOP
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata kelola	1.Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang	1.Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
		2.melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada	1.pelaksanaan sosialisasi doumen perencanaan tata ruang 2.meningkatnya kepatuhan pembanguann sesuai dokumen tata ruang
		3.menerbitkan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan	1.penerbitan keterangan rencanan kota sesuai dokumen perencanaan
		4.menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang	1.penerbitan rekomendasi IMB 2.Penyempurnaan

			tata cara perijinan penataan ruang 3.Meningkatnya pembangunan bangunan gedung sesuai dengan IMB
		5.melakukan penataan bangunan dan lingkungan	1.pembinaan tata bangunan dan lingkungan.
		6.melakukan pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan ruang	1.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		7.meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang	1.peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara negra
		8.menyediakan sistem informasi penataan ruang	1.penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS
		9.menyediakan data base aset tanah	1.penyediaan data base tanah aset Pemko
		10.melaksanakan sertifikasi tanah asset	1.pelaksanaan sertifikasi tanah aset pemko

## **H. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2020 telah dapat melaksanakan 12 (dua belas) program dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal
- ◆ Program Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan baik fisik maupun non fisik.
- ◆ Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.
- ◆ Program Sasaran Daerah adalah program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung capaian sasaran kinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) periode 2018-2023.

Adapun klasifikasi program prioritas dan program sasaran dan program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan program umum, sebagai berikut :

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Tahun 2020 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**2. Capaian Indikator Kinerja mengacu RPJMD 2018-2023**

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020**

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Realisasi 2019
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana publik	Persentase ketersediaan Sarana Publik	40%	33,33%	80%	16%
2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotar jalur utama yang ramah disabilitas	33%	20%	60,60%	17%
3	Program Pembangunan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	91,50%	86,50%	95%	85,60%
4	Program penerangan jalan umum	Persentase Penerangan jalan umum	75%	92,52%	127,49%	90,52%
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase RTH Publik	2,7%	4,20%	161,53%	4,20%
6	Program perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio Bangunan BerIMB	0,767	0.44	57%	0.44

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun kedua ini menunjukkan angka capaian yang cukup baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2020 memenuhi hampir mencapai target kinerja yang telah ditentukan kecuali pada rasio bangunan berIMB

dari target 0.777 dan realisasi 0,44 menunjukkan capaian 57% hal ini di sebabkan :

1. Fungsi kawasan bangunan tidak cocok karena banyak bangunan yang dibangun tidak di daerah pemukiman.
2. Standart retribusi IMB cukup mahal sehingga menyebabkan masyarakat yang mengurus IMB tidak mau membayar retribusi.
3. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengurus IMB dan mendirikan bangunan pada daerah pemukiman.

Adapun data pendukung pencapaian indikator kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Data Dasar Indikator Kinerja  
Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Tahun 2020**

No	Program	Indikator kinerja	Target	Pembilang/ Penyebut	Realisasi 2020	Capaian
1.	Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Persentase ketersediaan sarana publik	40%	$\frac{8}{24}$ unit x 100%	33,33%	83,33%
2.	Program Perencanaan dan pembinaan jasa konstruksi	Proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	44%	$\frac{248}{451}$ x 100%	54,98%	124,97%
3.	Program Pembangunan Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	91,50 %	$\frac{81.704 \text{ km}}{94.456}$ x 100%	86,50%	94,53%
4.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	33%	$\frac{1.890 \text{ m}}{5727,7}$ x 100%	20%	61%
5.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik	89%	$\frac{119785,25}{123919,25}$ x 100%	96,66%	108,61%
6.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dalam kota	1	$\frac{4108 \text{ m}}{8911}$ x 100%	46,10 %	46,10%
7.	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	65%	$\frac{79.306,71}{97.483,86}$ x 100%	81,35%	125,15%
8.	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	64%	$\frac{293}{265}$ x 100%	110%	171,87%
9.	Program penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan umum(pemasangan PJU etiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota	75%	$\frac{1923}{2079}$ x 100%	92,50%	123,33%

10	Program bangunan air kotor perkotaan	Panjang bangunan air kotor yang dibangun	2 km	$\frac{1,44225}{2} \text{ km} \times 100\%$	72%	72%
11	Program Pengembangankinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan pelayanan air limbah Cakupan air minum	80% 100%	$\frac{2}{2} \text{ unit} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \text{ unit} \times 100\%$	100% 100%	125% 100%
12	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota	2,7 %	$\frac{53,332 \text{ ha}}{1260,22} \times 100\%$	4,23%	156,66%
13.	Program perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio bangunan berIMB	0.767	$\frac{4157}{9362} \times 100\%$	0,44	57,36%

- Indikator kinerja persentase ketersediaan sarana publik pada program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik dari target 40% dengan realisasi kinerja 33,33% menunjukkan bahwasanya capaian kinerja dari target adalah 40% dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang telah direncanakan sehingga persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik terpenuhi. Dari 24 sarana publik yang harus tersedia bisa dipenuhi 8 sarana publik dan pemeliharaan ditahun 2020 seperti: Pemeliharaan Islamic Center, pemeliharaan gerbang batas kota.
- Indikator kinerja Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat pada Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi dari target 44% dengan realisasi kinerja 54,98% menunjukkan bahwa capaian kinerja dari target sebesar 124,97% dengan terpenuhinya proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebanyak 248 orang dari 451 orang tenaga kerja konstruksi.
- Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik pada Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan dari target 91,50 % dan realisasi kinerja sebesar 86,50% sehingga capaian sebesar 94,53% dengan panjang jalan yang dalam kondisi baik 81.704 km dari 94,456 km yang ada di kota padang panjang.
- Indikator kinerja Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas pada Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar dari target 33 % dengan realisasi 20% dengan capaian 60,60%.
- Indikator kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dari target 89% dengan realisasi 96,66% dengan capaian 108.61% dengan

terpenuhinya 119785,25 km drainase yang dalam kondisi baik dari 123919,25 km panjang seluruh drainase kota padang panjang.

- Indikator kinerja Terpeliharanya jalan dalam kota pada Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan realisasi 46,10 % dengan rehabilitasi jalan 4108 m dan 8911 m jalan yang dipelihara. data tersebut menunjukkan bahwa jalan terpelihara dengan baik karena kerusakan dan rehabilitasi hanya 46,10%.
- Indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya dengan target 65% dan realisasi 81,35% dengan capaian 125,15 % dengan panjang irigasi yang dalam kondisi baik 79.306,71 m dari 97.483,86 m irigasi yang dipelihara.
- Indikator kinerja Persentase panjang sungai yang dikonservasi 293 meter dari 265 meter yang seharusnya dikonservasi sehingga ada kenaikan capaian sebesar 177%. Pencapaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya karena adanya refokusing anggaran untuk penanganan covid-19.
- Indikator kinerja Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota) pada Program Penerangan jalan Umum dari target 75% dengan realisasi 92,52% dengan capaian 123%, dengan terpenuhinya 1923 titik PJU di setiap 50 meter panjang jalan utama dan jalan lingkungan yang seharusnya yaitu 2079 titik.
- Indikator kinerja Panjang bangunan air kotor yang dibangun dari Program bangunan air kotor perkotaan dari target 2 km telah terealisasi 1,44225 km sehingga capaian realisasi bangunan air kotor mencapai 72% . Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya karena adanya refokusing anggaran untuk penanganan covid 19.
- Indikator kinerja Cakupan pelayanan air limbah pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan target 79% dan realisasi 100% dengan capaian 126. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya karena adanya refokusing anggaran untuk penanganan covid-19.
- Indikator kinerja Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota pada Program Program pengelolaan ruang terbuka hijau dengan target 2,7% dan realisasi 4,23% dengan capaian 156,66% dengan data



ruang terbuka hijau publik yang tersedia 53,332 Ha dari 1260,22 Ha Ruang terbuka hijau kota padang panjang.

- Indikator kinerja Rasio bangunan berIMB pada Program perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dari target 0.767 dan realisasi 0.44 dengan capaian 57%. Data yang mendukung adalah jumlah bangunan yang berIMB 4157 dari 9362 bangunan yang ada. Capaian 57,36 % ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
  1. Fungsi kawasan bangunan tidak cocok karena banyak bangunan yang dibangun tidak di daerah pemukiman.
  2. Standart retribusi IMB cukup mahal sehingga menyebabkan masyarakat yang mengurus IMB tidak mau membayar retribusi.
  3. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengurus IMB dan mendirikan bangunan pada daerah pemukiman

### 3. Capaian indikator kinerja utama

Capaian kinerja indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018-2023 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dengan target dan realisasi pada tabelberikut.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Persen	67,14	68,69%	102,31%
	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	Persen	79,30	48,73	62%
	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	Persen	100	74,71	75%
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Indeks	2,8	2,8	100%

Dapat dilihat dari tabel diatas adanya realisasi kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja tahun 2020.

➤ **Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik**

Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik di Kota Padang Panjang tahun 2020 mengalami capaian sebesar 102,31% dari target persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik sebesar 67,14% dengan realisasi kinerja sebanyak 68,69%. Persentase ini didapat dari rata-rata pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dasar publik :

- a. Jalan dalam kondisi baik dengan panjang 81.704 km dari 94,456 km sehingga meningkat sebesar 86,50%
- b. Irigasi dalam kondisi baik dengan panjang 79.306,71 m dari 97.438,86 m sehingga kondisi baik sebesar 81,35%
- c. Drainase dalam kondisi baik dengan panjang 119.785,25 km dari 123.919,25 km sehingga kondisi baik sebesar 96,66%
- d. Trotoar disabilitas dalam kondisi baik dengan panjang 20%
- e. Luasan RTH yang memenuhi 12,55% dengan data 158.161 ha yang dari 1260,22 ha .
- f. Sarana sanitasi ( air minum dan air limbah ) yang telah dibangun 4 unit dari 4 unit yang direncanakan sehingga terlaksana 100%.
- g. PJU yang dalam kondisi baik 1.923 titik dari 2079 titik sehingga tercapai 92,52%

➤ **Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak**

Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak terealisasi sebesar 48,73 % dari target tahun 2020 79,30% dengan Total jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak sebanyak 7553 kk dari seluruh jumlah rumah yang ada di kota padang panjang yakni 15499 kk, pada tahun 2020 sehingga mengalami capaian sebesar 62 %. Capaian Tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya karena refocusing anggaran untuk penanganan covid 19.

➤ **Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**

Target indikator ini pada tahun 2020 mengalami capaian sebesar 75% dari target persentase proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap air minum layak 100% dengan realisasi kinerja 74,71%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu 11580 kk dari 15499 kk yang ada di kota Padang Panjang. Capaian Tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya karena refocusing anggaran untuk penanganan covid 19.

➤ **Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang**

Indeks penilaian ruang yang sesuai dengan tata ruang tahun 2020 adalah sebesar 2,8 dari target tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Data ini dalam bentuk angka : Pemanfaatan ruang yang sesuai sebesar  $2832,125 \text{ Km}^2 / 2914,216 \text{ Km}^2$  pemanfaatan ruang keseluruhan  $\times 100\% = 97,18\% = 2,8$  (indeks)

**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 sebesar Rp. 15.417.355.827,42,- (83,55%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.453.148.855,00,-, sebagai berikut :

**1. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama**

Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan sasaran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 14.474.024.375,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.175.765.273,40,- atau sebesar 84,12%, sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Publik Dalam Kondisi Baik	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	620.121.700	562.451.550	90,70%
		Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi	133.462.500	121.610.100	91,12%
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.251.855.000	5.942.082.681,63	81,94%
		Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	79.970.775	48.915.900	61,17%
		Program Pembangunan Saluran	370.000.000	346.895.305	93,76%

		Drainase/Gorong-Gorong			
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	2.062.675.000	1.577.523.971,79	76,48%
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	45.500.000	36.485.920	80,19%
		Program Penerangan Jalan Umum	916.299.400	756.166.026	82,52%
	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	28.487.800,00	25.759.750	90,42%
	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	28.487.800,00	25.759.750	90,42%
Meningkatnya kesesuaian gunalahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.322.390.100	2.145.210.468	92,37%
		Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	643.262.100,00	612.663.601	95,24%
<b>JUMLAH</b>			<b>14.474.024.375,00</b>	<b>12.175.765.273,40</b>	<b>84,12%</b>

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa target program indikator kinerja utama terealisasi dengan capaian bernilai baik, hal ini membuktikan bahwasanya target tercapai untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang serta misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang lebih lanjut diuraikan pada realisasi kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tabel 3.6

## 2. Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah

Anggaran program sasaran daerah yang menjadi salah satu indikator penghitungan kualitas infrastruktur berkelanjutan di Kota Padang Panjang Panjang,

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah**

## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	620.121.700	562.451.550	90,70%
		Program Pembangunan/ Rehabilitasi jalan dan Jembatan	7.251.855.000	5.942.082.681,63	81,94%
		Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	79.970.775	48.915.900	61,17%
		Program penerangan jalan umum	916.299.400	756.166.026	82,52%
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.322.390.100	2.145.210.468	92,37%
		Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	643.262.100	612.663.601	95,24%
<b>JUMLAH</b>			<b>11.833.899.075</b>	<b>10.067.490.226,63</b>	<b>85,07%</b>

Program yang mendukung sasaran daerah pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 6 program anggaran sebesar Rp. 11.833.899.075,00 terelisasi sebesar Rp. 10.067.490.226,63 (85,07%).

### 3. Realisasi Anggaran Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan anggaran yang menjadi dasar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target anggaran sebesar Rp. 14.474.024.375,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.896.427.121,- atau (86,64%), dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

#### Realisasi Anggaran Program Urusan Pekerjaan Umum

**Tahun 2020**

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
V	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik</b>	<b>620.121.700</b>	<b>562.451.550,00</b>	<b>91 %</b>
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	70.535.400	42.410.400	60%
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Umum	310.450.000	297.669.250	96 %
	3 Rehab Sarana Prasarana Umum	38.800.000	22.035.600	57 %
	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	200.336.300	200.336.300	100%
VI	<b>Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi</b>	<b>133.462.500</b>	<b>121.610.100</b>	<b>91 %</b>
	1 <b>Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi</b>	3.200.000	3.190.350	98%
	2 Penyusunan Database Drainase dan Trotoar	105.725.000	104.003.250,00	98,37 %
	3 Penyusunan Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum	24.537.500	14.416.500	59 %
VII	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan</b>	<b>7.251.855.000</b>	<b>5.942.082.681,63</b>	<b>82 %</b>
	1 Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar	396.050.000	389.345.000,00	98 %
	2 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	718.300.000	681.454.203,75	95 %
	3 Penunjang DAK Infrastruktur Jalan	179.540.000	82.567.600	46%
	4 DAK Bidang Jalan	5.957.965.000	4.788.715.877,88	80 %
VIII	<b>Pembangunan Dan Pemeliharaan Trotoar</b>	<b>79.970.775</b>	<b>48.915.900,00</b>	<b>81 %</b>
	1 Pembangunan Trotoar	32.500.000	22.114.700,00	68,05 %
	2 Rehabilitasi Trotoar	47.470.775	26.801.200,00	56 %
IX	<b>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>370.000.000</b>	<b>346.895.305,00</b>	<b>94 %</b>
	1 Rehabilitasi Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong	370.000.000	346.895.305,00	94%
X	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Penggairan Lainnya</b>	<b>2.062.675.000</b>	<b>1.577.523.971,79</b>	<b>76 %</b>
	1 Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	513.400.000	492.061.889,78	96 %
	2 Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi	152.600.000	78.462.082	51%
	3 DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	1.396.675.000	1.007.000.000,01	72%
XI	<b>Pengembangan , Pengelolaan Dan Konservasi Sungai</b>	<b>45.500.000</b>	<b>36.485.920</b>	<b>80 %</b>
	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	22.650.000	18.130.320	80 %
	2 Pembangunan Pengaman Sungai	22.850.000	18.355.600	80 %
XII	<b>Program Penerangan Jalan Umum</b>	<b>916.299.400</b>	<b>756.166.026,00</b>	<b>83 %</b>

	1	Penambahan jaringan Tiang lampu Jalan Dalam Kota	-	-	-
	2	Pemeliharaan Jaringan, Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota	916.299.400	756.166.026,00	83 %
<b>XIII</b>	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>		<b>2.322.390.100</b>	<b>2.145.210.468</b>	<b>92 %</b>
	1	Penataan RTH	403.690.100	384.308.530	95 %
	2	Pemeliharaan RTH	1.918.700.000	1.760.901.938	92 %
<b>XIV</b>	<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>28.487.800</b>	<b>25.759.750</b>	<b>90 %</b>
	1	Dana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)	4.875.000	2.146.950	44%
	2	DAK Sanitasi Air Limbah	-	-	-
	3	Bangunan Pembuangan Air Kotor	23.612.800	23.612.800	100 %
	4	Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum	-	-	-
<b>XVII</b>	<b>Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>643.262.100</b>	<b>612.663.601</b>	<b>95 %</b>
	1	Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	15.050.000	13.582.000	90%
	2	Survey dan Pemetaan	8.350.300	6.705.138,00	80 %
	3	Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Fasilitas Umum	-	-	-
	4	Pematokan Tanah Yang Telah Diserahkan Masyarakat Untuk Fasilitas Umum	-	-	-
	5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	14.250.000	3.588.750,00	25,18 %
	6	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	10.950.000	4.993.700,00	46 %
	7	Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	-	-	
	8	Revisi RTRW	594.661.800	583.794.013,00	98 %
<b>JUMLAH</b>			<b>14.474.024.375</b>	<b>12.175.765.24,30</b>	<b>84,12 %</b>

- ✓ Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik dengan anggaran sebesar Rp. 14.474.024.375,- terealisasi sebesar Rp. 12.175.765.24,30(84%) dialokasikan untuk 4 kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pembangunan sarana prasarana pasar, rehab sarana dan prasarana umum.
- ✓ Program Perencanaan dan pembinaan jasa konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 133.462.500,- terealisasi sebesar Rp. 121.610.100,- (91%) dialokasikan untuk kegiatan pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi, penyusunan database drainase dan trotoar dan Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum.



- ✓ Program pembangunan, Rehabilitasi jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.251.855.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.942.082.681,63,- (82) dialokasi untuk kegiatan pemeliharaan rutin berkala trotoar, pemeliharaan rutin jalan dalam kota, penunjang DAK Infrastruktur Jalan dan DAK bidang jalan.
- ✓ Program pembangunan dan pemeliharaan trotoar dengan anggaran sebesar Rp. 79.970.775,- terealisasi sebesar Rp. 48.915.900,- (81%) dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Trotoar dan Rehabilitasi Trotoar.
- ✓ Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong dengan anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 346.895.305,- (94%) dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase gorong-gorong.
- ✓ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Penggairan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp2.062.675.000,- terealisasi sebesar Rp.1.577.523.971,79,-(76%) dialokasikan untuk kegiatanRehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan).
- ✓ Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai dengan anggaran sebesar Rp 45.500.000,- terealisasi sebesar Rp.36.485.920,- (80%) dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengamanan Sungai.
- ✓ Program Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan anggaran sebesar Rp 916.299.400,- terealisasi sebesar Rp. 756.166.026,-(83%) dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan Jaringan, Tiang dan Lampu Jalan Dalam Kota.
- ✓ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp 28.487.800,-teralisasi sebesar Rp. 25.759.750,-(90%) dialokasikan untuk kegiatanDana Penunjang Operasional (DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah) dan Bangunan Pembuangan Air Kotor.
- ✓ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar Rp2.322.390.100,-teralisasi sebesar Rp. 2.145.210.468,-(92%) dialokasikan untuk kegiatanPenataan RTH dan Pemeliharaan RTH.
- ✓ ProgramPerencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 643.262.100,-teralisasi sebesar Rp. 612.663.601,-(95%) dialokasikan untuk kegiatanPembinaan

Fasilitasi TIM Ahli Bangunan Gedung, Rapat Koordinasi Perencanaan Tata ruang, Revisi Perda RTRW, Survey dan Pemetaan, Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat Yang Terkena Fasum, Pematokan Tanah yang Telah Diserahkan Masyarakat Untuk Fasum, Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

#### 4. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum

Realisasi anggaran program/kegiatan umum tahun 2020 sebesar Rp. 3.979.124.480,- dari target anggaran sebesar Rp.3.241.590.554,- atau 81,45%, sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum**  
**Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2020**

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.887.124.480</b>	<b>3.156.000.054</b>	<b>81%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	502.445.780	441.862.916	88%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	196.957.000	171.967.479	87%
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.050.000	9.892.200,00	76%
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	175.756.000	150.157.176,00	85%
5	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	37.845.600	21.000.675,00	55%
6	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	64.870.100	56.225.000,00	87%
7	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	2.896.200.000	2.304.894.608	80%
II	<b>Program Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>92.000.000</b>	<b>85.590.500</b>	<b>93%</b>
1	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	92.000.000	85.590.500	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.979.124.480</b>	<b>3.241.590.554</b>	<b>81,45%</b>

## **1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai instansi teknis sektor pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang berusaha untuk bertanggungjawab memcapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

## **2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah**

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2020 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Salah satunya adalah refokusing anggaran untuk penanganan covid 19 yang sangat berdampak pada capaian kinerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Bagi kegiatan yang difokusing diharapkan agar dapat dianggarkan kembali pada tahun mendatang sesuai dengan pagu indikatif yang ada.

2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
3. Masih terbatasnya teknologi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
4. Data Base yang belum lengkap sehingga hasil perencanaan fisik belum optimal.
5. Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan pendidikan.
6. Jumlah ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil dan arsitek masih kurang
7. Belum optimalnya hasil perencanaan fisik secara keseluruhan.
8. Belum profesionalnya tenaga teknik pengusaha jasa konstruksi yang ada.

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Belum lengkapnya sarana, prasarana dan teknologi penunjang untuk kelancaran pekerjaan.
2. Belum lengkapnya Data Base yang diperlukan dalam proses perencanaan.
3. Belum profesionalnya tenaga teknik pelaku jasa konstruksi.
4. Belum tercapainya perencanaan yang terencana dan terukur.

**Padang Panjang, Januari 2021**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA PADANG PANJANG**



**WELDA YUSAR.ST.MT**  
**NIP.19720810 199903 2 008**